



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 663/SEK/KS.00/5/2019
Lampiran : Satu bundel
Perihal : Upacara Bendera dalam rangka Peringatan
Hari Lahir Pancasila Tahun 2019

Jakarta, 20 Mei 2019

- Yth. 1. Kepala Pengadilan Militer Utama
2. Para Ketua Pengadilan Tinggi
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama
4. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi
5. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
6. Para Ketua Pengadilan Negeri
7. Para Ketua Pengadilan Agama
8. Para Kepala Pengadilan Militer
9. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

di -

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 2019 Nomor 485/Set.KMA/IN/V/2019 sehubungan dengan diterimanya surat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor: B.116/Ka.BPIP/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Tempat Pelaksanaan Upacara di Kantor Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada wilayah masing-masing lingkungan.
2. Waktu Pelaksanaan Upacara pada pukul 08.00 waktu setempat atau disesuaikan.
3. Pembina Upacara adalah Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Pembina Upacara menyampaikan amanat dan atau membacakan naskah Pidato Presiden RI.
5. Pimpinan dan Hakim mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)/Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai lainnya mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH).
6. Memasang spanduk peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2019 dengan memperhatikan aspek-aspek kerapian, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

MAHKAMAH AGUNG
RI
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
S. Pudjoharsyo

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Mei 2019

Nomor : B. 116 /Ka.BPIP/05/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila 2019

Kepada Yth.
(daftar terlampir)
di –

Tempat

Dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila.
2. Rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila diawali dengan upacara secara serentak pada hari Sabtu, 1 Juni 2019 pukul 08.00 WIB yang dipusatkan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, dan akan dipimpin oleh Presiden RI selaku Inspektur Upacara. Pada waktu yang sama (menyesuaikan dengan waktu setempat) upacara juga dilakukan di seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, dan Perwakilan RI di luar negeri (pedoman pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila terlampir).
3. Peringatan Hari Lahir Pancasila akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan di bulan Juni sebagai bulan Pancasila yang antara lain berupa kegiatan dialog dan temu masyarakat/komunitas di berbagai daerah di Indonesia serta silaturahmi Pancasila di Jakarta.
4. Agar peringatan Hari Lahir Pancasila 2019 lebih semarak dan bermakna, dihimbau kepada masing-masing institusi untuk:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pemahaman nilai-nilai Pancasila;
 - b. Melakukan publikasi dan diseminasi semarak Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2019 yang dilakukan di Kementerian/Lembaga masing-masing sesuai ketentuan yang ada;
 - c. Memasang spanduk peringatan Hari Lahir Pancasila 2019 dengan memperhatikan aspek-aspek kerapian, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Lampiran Surat
Nomor : B. 116/Ka.BPIP/05/2019
Tanggal : 13 Mei 2019

A. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
3. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

B. Sekretaris Kementerian/Kementerian Koordinator

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
5. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
8. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
9. Sekretaris Kementerian Pariwisata
10. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
12. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

C. Sekretaris Jenderal Kementerian

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

20. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang

D. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet

E. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

1. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
4. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
5. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
7. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
8. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
9. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
10. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
11. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
12. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
13. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
14. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
15. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional
16. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
17. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
18. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional RI
19. Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
20. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
21. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
23. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
24. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional)
25. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
27. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif
28. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
29. Sekretaris Utama Badan Urusan Logistik

F. Sekretaris Daerah Provinsi

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

8. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung
9. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
10. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
30. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua

G. Lain-lain

1. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
4. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
5. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
6. Sekretaris Jenderal Komisi Aparatur Sipil Negara
7. Sekretaris Utama PPATK